BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi Daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan / kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan banyak faktor pendukung. Sumber Pembiayaan Daerah atau PAD (Pendapatan Asli Daerah) komponen utamanya berasal dari komponen pajak Daerah dan Retribusi Daerah. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) adalah kontruksi keuangan daerah yang memiliki fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan fungsi Pemerintahan Daerah, maka sistem akuntansi pemerintahan harus mencakup kedua sistem tersebut.

Dalam pelaksanaan di lapangan, sistem akuntansi Pemerintahan Daerah tersebut dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Akuntansi realisasi pendapatan SKPKD harus didukung dengan buktibukti sah berupa SKP Daerah, Tanda bukti pembayaran, STS (Surat Tanda Setoran) dan bukti-bukti yang sah lainnya. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 79 menyebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturanperaturan bagi kepentingan daerah. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah diberlakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan persyaratan usaha dan strategi tertentu mengingat kondisi BUMD yang masih memprihatinkan.

Menurut Halim (2014) ada beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Potensi sumber-sumber PAD, Faktor-faktor pendukung Letak geografi wilayah, Kesuburan tanah, Kekayaan hasil tambang dan Usaha ekonomi produktif sebagai lapangan kerja.

Peranan perusahaan daerah diwujudkan dalam bentuk pembagian laba yang disetorkan kepada pemerintah daerah yang

bersangkutan, dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan pembangunan di daerah. Kenyataan sekarang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan daerah yang merupakan salah satu komponen PAD belum memperhatikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD, bahkan ada indikasi bahwa perusahaan daerah selama ini hanya membebani pemerintah daerah dengan berbagai subsidi terselubung dan biaya semu, sehingga perusahaan daerah tidak mempunyai kemandirian dalam menjalankan usahanya.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. Badan Usaha Dalam Hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaanair bersih.

Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air

bersih. sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. PDAM sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang dihadapi PDAM Kabupaten Enrekang terdapat pada banyaknya tunggakan pelanggan tiap tahunnya yang menyebabkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami kerugian.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap PAD Kabupaten Enrekang ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan PDAM terhadap PAD Kabupaten Enrekang.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktek yang telah dikembangkan.
2. Bagi Lingkungan Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan untuk menambah bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau bagi yang ingin mengetahui pengaruh Pendapatan PDAM terhadap PAD Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan

Pengertian Pendapatan Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi, dkk (2012) adalah: Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Greuning, et al. (2013) mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut: IAS 8 mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode, muncul dari aktivitas bisnis normal, dan menghasilkan kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari kontribusi pemilik ekuitas.

Menurut Sodikin dan Riyono (2014), “Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Kemudian Lam dan Lau (2014) mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut: Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) mendefinisikan: Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Selanjutnya pada halaman 23.2 paragraf 7 dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama

suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Martani, dkk (2016) definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut: Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fees), bunga (interest), dividen (dividend), dan royalti (royalty).

Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Greuning, et al. (2013) menyebutkan bahwa pendapatan dapat berasal dari:

1) Penjualan barang
2) Pemberian jasa

3) Penggunaan aset entitas oleh entitas lain yang menghasilkan bunga
4) Royalti
5) Dividen

Sumber pendapatan tersebut dijelaskan dalam IAS 8, selain sumbersumber di atas Greuning juga menjelaskan terdapat sumber pendapatan lain yaitu pendapatan sewa (IAS 37), investasi dengan metode ekuitas (IAS 28), kontrak asuransi, perubahan dalam nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan (IAS 39), dan pengakuan awal dan perubahan dalam nilai wajar atas aset biologis (IAS 41).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini:

1) Penjualan barang
2) Penjualan jasa,
3) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti, dan dividen.

Kesimpulannya pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya

dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan deviden.

3. Pengakuan Pendapatan

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya (andal). Dalam kenyataan praktek akuntansi, pengakuan pendapatan suatu perusahaan untuk periode tertentu dapat terjadi pada saat sebelum atau sesudah penjualan. Dilihat dari hal ini, maka secara teoritis titik waktu pengakuan pendapatan dapat diakui pada saat tertentu, yakni:

1) Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan)
   Penjualan dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan.
2) Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan
   a) Pengakuan pendapatan selama proses produksi
      Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Metode akuntansi yang digunakan adalah

metode persentase penyelesaian. Metode ini digunakan dalam kontrak proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu beberapa periode akuntansi. Syarat diterapkan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian adalah jika harga kontrak sudah pasti dan taksiran cost untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan.

b) Pengakuan pendapatan setelah proses produksi Pengakuan pendapatan setelah proses produksi mengakui pendapatan pada saat produksi selesai. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode kontrak selesai. Metode ini juga digunakan dalam proyek jangka panjang dimana pelaporan pendapatannya didasarkan pada hasil akhir proyek yang sudah diselesaikan.

3) Pengakuan pendapatan setelah penyerahan / saat kas diterima Pengakuan pendapatan pada saat diterima uang tunai atau kas terjadi, jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang atau perolehan kas yang timbul dari penjualan barang dan jasa, sehingga pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran.

Kondisi ini biasanya ditemui pada pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan cicilan/angsuran.

4) Pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan khusus Pengakuan pendapatan yang dilakukan memerlukan ketentuan khusus karena penjualan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Jenis penjualan yang termasuk di dalam karakteristik ini adalah penjualan atas barang konsinyasi dan penjualan waralaba (franchise).

Selanjutnya Greuning, et al. (2013) menjelaskan bahwa pendapatan tidak dapat diakui ketika beban yang terkait tidak dapat diukur dengan andal. Pembayaran yang sudah diterima untuk penjualan tersebut harus ditangguhkan sebagai liabilitas sampai pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Pengakuan pendapatan atas jasa dilakukan sebagai berikut:

1) Ketika hasil (jumlah pendapatan, tahap penyelesaian, dan biaya) dari transaksi dapat diestimasikan dengan andal, pendapatan diakui menurut tingkat penyelesaian pada tanggal pelaporan.
2) Ketika hasil dari transaksi tidak dapat diestimasikan dengan andal, biaya kontrak yang dapat diperbaharui akan menentukan besarnya pengakuan pendapatan.

Greuning, et al. (2013) juga menyebutkan bahwa “Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah kontrak yang disetujui pada

awalnya, dan pembayaran untuk variasi, klaim, dan insentif sepanjang terdapat kemungkinan bahwa pembayaran- pembayaran tersebut akan menghasilkan pendapatan dan mampu diukur dengan andal". Ada dua metode pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi yaitu:

1) Metode Kontrak Selesai (Completion Method/Completed Contract Method), pendapatan kontrak konstruksi diakui setelah pekerjaan selesai 100%.
2) Metode Persentase Penyelesaian (Percentage of Completion Method), pendapatan kontrak konstruksi diakui pada setiap periode pelaksanaa pekerjaan berdasarkan % penyelesaian pekerjaan periode yang bersangkutan.

Untuk penerimaan uang muka, pengeluaran biaya konstruksi, penagihan jasa konstruksi dan hasil penagihan pencatatan/jurnal dalam buku kontraktor untuk kedua metode pengakuan pendapatan (metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian) sama, yang berbeda adalah jurnal penutup untuk pengakuan pendapatan dan biaya. Pada metode kontrak selesai, jurnal penutup pengakuan pedapatan dan biaya dilakukan pada periode kontrak selesai, sehingga pendapatan, biaya dan L/R proyek terakumulasi pada periode kontrak selesai.

Pada metode persentase penyelesaian, jurnal penutup pengakuan pendapatan dan biaya dilakukan setiap periode sesuai

dengan % termin dan biaya yang dikeluarkan masing-masing periode, sehingga pendapatan, biaya, dan L/R proyek teralokasi pada tiap periode kontrak. Penerimaan uang muka, pengeluaran biaya, penagihan, hasil penagihan, serta jurnal penutup

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), “Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal”. Pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah: Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.

Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi:

1) Total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal
2) Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas

3) Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal,
4) Biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

Pengakuan pendapatan menurut Martani, dkk (2016), yaitu: Pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan.

Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, umum terjadi pada kontrak konstruksi gedung. Pendapatan sudah dapat diakui sebelum penyerahan gedung dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi. Metode akuntansi untuk mengakui pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Uraian tersebut dapat disimpulkan apabila pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan keuangan daerah, dimana pendapatan keuangan tersebut yang sah berfokus dari kemampuan-kemampuan yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Penerimaan Pajak Daerah

Iuran daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk mendanai rumah tangganya dapat disebut juga sebagai pajak daerah. Pajak daerah merupakan tagihan yang dilakukan pemeritah daerah yang hasilnya dimanfaatkan untuk pendanaan anggaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung.

Menurut Maznawaty et al. (2015) pajak daerah adalah iuran yang wajib dilaksanakan oleh daerah kepada perseorangan atau badan yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung dan seimbang, yang mana dapat dipaksakan berlandaskan aturan undang-undangan yang berlaku, yang

dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dan infrastruktur daerah.

Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan iuran yang telah secara sah menjadi iuran daerah tersebut sebagai pembayaran sewa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah tersebut. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat dalam pelaksanaannya, yaitu bersifat ekonomis, ada imbalan secara langsung walaupun menaati persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada solusi apabila mau ataupun tidak mau membayar, merupakan iuran yang pada umumnya bersifat budgetair tidak dominan, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah dimanfaatkan untuk sesatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat atas balas jasa atau sewa yang telah dilakukan.

Menurut Himmawan dan Wahjudi (2014) retribusi daerah adalah pembayaran yang sah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut secara khusus yang diberikan atau

disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran sangat penting karena dapat menguntungkan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing daerah tersebut.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah yang mempunyai keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan asli daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan ekonomi.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatanpendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka

bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

5. Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk dimasa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. (Susanawati, 2014) Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan maka didalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata “proforma” yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar keadaan keuangan perusahaan yang belum tercapai. Informasi yang didalamnya masih dalam bentuk proyeksi/perencanaan mengenai keadaan keuangan dimasa yang akan datang.

Menurut Ampuyak et al. (2016) analisis proyeksi juga dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat pertumbuhan penduduk yang akan datang berdasarkan perhitungan ilmiah dengan asumsi tertentu dari variable pertumbuhan.

6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

a. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan

daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962, Tentang Perusahaan, Ayat 2, Pasal 5Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

1) Meningkatkan Produksi;
2) Perluasan Kesempatan Kerja, dan
3) Meningkatkan Pendapatan Daerah

Disisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebankan padanya, pokoknya adalah:

1) Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunandaerah;
3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidangusaha;

4) Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolan BUMD perlu dioptimalkan agar benar- benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensiyang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

b. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik

Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut:

1) BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
2) Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaaan usahanya;
3) Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
4) BUMD pemimpinya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
5) Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;
6) Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
7) Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;
8) Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin;
9) Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;
10) BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

c. Tujuan dan Manfaat Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik sekala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Pada era otomoni daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimilik daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMDantara lain :

1) Ekonomi, yaitu hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah,untuk mengembangkan potensi ekonomi yang diliki daerah, perlu

diatur sebuah strategi agar dapat berkembang, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah serta pengelolaan menajemen yang bagus adalah kunci mengembangkan potensi ekonomi yng dimiliki daerah, selain itu pemerintah daerah harus memberikan pelayanan masyarakat (*public services)* dan mencari keuntungan (*provit motive);*

2) Strategis, yaitu pemerintah daerah atau perusahaan daerah harus mampu dan mempunyai strategi untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah bekerjasama pihak-pihak terkait mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, dimana pada tataran di masayarakat ata swasta belum ada ha tersebut, hal itu dikarenakan baik atas keterbatasan pengetahuan, modal dan resiko.
3) *Budget,* yaitu pencarian pendapatan daerah diluar pajak, adalah sangat penting, dimana sumber-sumber lain diluar pajak haruslah dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik dengan cara mengembangkan potensiyang dimili daerah, atau dengan cara mendirikan perusahaan daeraha, untuk membantu mengelola dan mengembangkan daerah, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat terlaksana.

d. Modal dan Kekayaan BadanUsaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal dan kekayaan, yaitu:

1) Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan;
2) Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham- saham;
3) Apabila modal Badan Usaha Milik Daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
4) Modal Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak lain (swasta);
5) Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk *liquid* disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonessia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham perioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta, sedangkan saham

perioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari[9] Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut hal tersebut bisa dilihat dari bunyi 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

e. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD atau perusahaan daerah dalam pengelolaanya dipegang oleh direksi, dalam pengangkatan direksi suatu perusahaan daerah dilakukan oleh kepala daerah dengan pertimbangan DPRD tempat perusahaan daerah itu didirikan, tata cara pengangkatan direksi pada perusahaan daerah telah diatur dalam peraturan daerah. Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi.

Jumlah anggota serta susunan Direksi diatur di dalam peraturan daerah yang merupakan peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota direksi dapat dilakukan oleh kepala daerah, jika modal badan usaha atau perusahan daerah seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengangkatan anggota Direksi BUMD atau perusahan daerah bisa dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha yang modalnya sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Direksi dalam menjalankan perusahaan diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya, agar menjadi lebih baik. Dalam pelaksanannya, kewenangan yang dimiliki direksi dibatasi di dalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut. Pembatasan ini sebagai kontrol oleh pemerintah daerah serta untuk menyesuaikan akan karakter perusahaan daerah masing-masing. Oleh karena itu hal yang wajar kekuasaan tersebut di atas ditetapkan dalam peraturanpendirian perusahaan yang bersangkutan.

B. Penelitian Terdahulu

Hasanuddin (2016). Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh persamaan akhir estiminasi yaitu Ln_Y = 24.671 + (-0.038) Ln_X (pendapatan PDAM), konstanta sebesar 24,671 artinya apabila variabel pendapatan PDAM tidak sama dengan nol maka PAD menurun sebesar 24,671. Setiap kerugian 1 persen dari pendapatan perusahaan daerah air minum (PDAM) maka akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar (-0.038). Koefisien determinasi

( ) = 0,241 menunjukkan bahwa variabel pendapatan PDAM tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 76,9 % di pengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model penelitian ini. Uji t menunjukan < yaitu (-.976) < 2,353 maka pendapatan PDAM tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan a = 5 %, hal ini berarti diterima dan ditolak yang artinya PAD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pendapatan PDAM atau dengan kata lain bahwa pendapatan PDAM merupakan faktor yang tidak dapat menentukan PAD secara nyata. Selain itu karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka parsial pendapatan PDAM tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat.

Edie Sugiarto (2015). Analisis Efektivitas Pdam Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Lamongan (Effectiveness Analysis Pdam To Increase Local Revenues In Lamongan). Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan perhitungan efektivitasnya menunjukkan bahwa Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD di kabupaten Lamongan tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin menurun tingkat efektivitasnya, meskipun demikian masih dalam kriteria sangat efektive. Dengan hasil tersebut maka, Penyertaan Modal BUMD adalah satu sumber pendapatan yang potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Tetapi PDAM

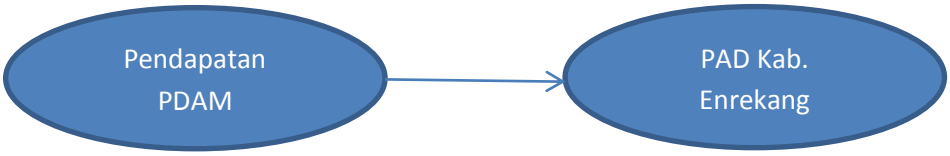
sangat tidak efektif karena laba yang didapat lebih kecil dari kewajiban yang dibayarkan.

Ike Juni Antika. (2017). Analisis Kontribusi Bumd Terhadap Peningkatan Pad Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015. Secara keseluruhan hasil analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara parsial atau Uji-t kontribusi laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Kemudian, penelitian ini diperkuat dengan hasil kontribusi BUMD pada tahun 2006-2015 di Kota Bandar Lampung, dimana hasil kontribusi Laba BUMD terhadap PAD selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif. Meskipun bersifat fluktuatif , tetapi laba BUMD tidak memberikan kontribusi dibawah 20%, sehingga dengan begitu kontribusi laba BUMD di Kota Bandar Lampung dikategorikan cukup baik selama sepuluh tahun. Dalam pandangan Ekonomi Islam, BUMD di kota Bandar Lampung tidak hanya sebagai alat pengumpul pendapatan daerah serta pengendalian ekonomi semata namun juga sebagai sumber pembiayaan di kota Bandar Lampung dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka piker dalam penelitian untuk melihat pengaruh pendapatan PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada gambar tersebut.

GAMBAR 2 1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Berdasarkan teori dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini yakni: diduga Pendapatan PDAM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Dinas BAPENDA dan PDAM Kabupaten Enrekang . Untuk memperoleh data yang akurat terkait pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka jangka waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (Juli sampai dengan bulan September 2021)

B. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
2. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Menurut Juliansyah Noor (2011) teknik observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti secara langsung

terhadap objek penelitian. Beberapa indormasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu, dan perasaan.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai atau pihak yang dirasa dapat memberikan informasi terkait objek penelitian, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

3. Dokumentasi yaitu mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu:

   a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui pembagian kuisioner dan observasi dengan informan untuk memperoleh data yang sebenarnya dilapangan.
   b. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Person* (orang).

b. *Place* (tempat).

c. *Paper* (dokumen) yaitu bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, catatan, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

E. Teknik Analisis Data

1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya sekitar dua Variabel (Sugiyono:2017).

Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011):

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Pendapatan PDAM

a : bilangan konstan

b : koefisien variabel bebas

x *:* Pendapatan Asli Daerah

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. .Kabupaten Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Kota Makassar, terdiri dari 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km^2 dengan populasi penduduk ± 190.579 jiwa. Penduduk di Kabupaten Enrekang sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian.

1. Letak Geografis Kabupaten Enrekang

   Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3º 14’ 36” sampai 3º 50’ 00” Lintang Selatan dan 190º 40’ 53” sampai 120º 06’ 33” Bujur Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :

   a. Batas Utara : Kabupaten Tanah Toraja
   b. Batas Timur : Kabupaten Luwu
   c. Batas Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
   d. Batas Barat : Kabupaten Pinrang

2. Letak dan Kondisi Geografis

   Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara 3014’36” - 3050’0” Lintang Selatan dan 119040’53” -

12006’33” Bujur Timur. Posisi ini terletak tepat di Jantung Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi melalui jalan Strategis Nasional untuk Pariwisata di Tana Toraja.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis untuk pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi. Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, 112 Desa dan 17 Kelurahan.

3. Topografi

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong dan lain-lain

Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur.

Topografi wilayah kabupaten Enrekang sebagian besar berada pada ketingggin > 1500 m dpl. Pada ketinggian tersebut relatif banyak kendala untuk berbagai kegiatan pembangunan. Khususnya pada ketinggian >2000 m dpl tidak dapat dikembangkan untuk budidaya yang bersifat ekonomi, hal ini dikarenakan daerah dengan ketinggian tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebaran wilayah pada ketinggian tersebut berada pada bagian timur wilayah kabupaten Enrekang seperti Kecamatan Bungin dan Buntu Batu.

Sifat fisik tanah cukup menjadi kendala bagi pengembangan

wilayah adalah kemiringan lahan pada wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh kemiringan lahan 25->40%. Namun demikian areal lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal masih banyak dan merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan khususnya untuk tanaman lahan kering baik tanaman perkebunan, buah-buahan atau tanaman keras lainnya.

4. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya, maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9 (Sembilan) yaitu: Brown Farest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Cendana, Mediterian Coklat kekelabu-labuan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang, Mediteran Coklat banyak terdapat di Kecamatan Anggeraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Coklat banyak terdapat di Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka, Podsolik Kekuningan banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Violet terdapat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.

5. Hidrologi

Secara umum Kondisi Hidrologi yang ada di Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari.

Daerah Aliran Sungai yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan. Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient yang rendah sehingga terbentuk sungai-sungai yang berkelok-kelok.

6. Klimatologi

Meskipun kondisi iklim dan curah hujan bisa berubah setiap saat tetapi secara umum curah hujan yang ada di Kabupaten Enrekang di bagi tiga kategori. Curah hujan hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Maiwa, sementara daerah di Kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, sebagian Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka mempunyai curah hujan yang rendah. Khusus Kecamatan Curio,

Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, sebagaian Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja mempunyai curah hujan kategori sedang.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Enrekang, akan ditujukan untuk menuju pencapaian visi daerah sebagai daerah Agropolitan Mandiri. Kabupaten Enrekang juga telah ditetapkan dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori sebagai pusat pengembangan Bawang Merah di Indonesia Bagian Timur. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Enrekang mencakup berbagai sektor, selain sektor pertanian, juga potensi disektor pertambangan, Energi dan Pariwisata cukup potensil.

Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Kawasan Agropolitan Belajen sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi, bahkan juga Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional Kapet Parepare yang diarahkan sebagai basis pengembangan Tanaman Hortikultura, Kopi dan Peternakan.

Berdasarkan Arahan Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang, maka ada beberapa kawasan Strategis Daerah yang akan dikembangka kedepan, antara lain sebagai berikut :

a. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
b. Kawasan perkebunan dan holtikultura (kopi, Vanila, kakao dan Palawija);
c. PKL Kabupaten Enrekang;
d. Kawasan Cepat Tumbuh PKLp Kota Baraka;
e. Kawasan Industri Maiwa (KIWA);
f. Kawasan Perkotaan Penyangga PKLp Maiwa; dan
g. Kota Penyangga PKLp Cakke;
h. Kawasan Strategis Sosial Budaya
i. Desa Wisata “NO SMOKING VILLAGE (kawasan bebas merokok)” di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka;
j. Kawasan pekuburan batu (mandu) di Tontonan Kecamatan Anggeraja;
k. Kawasan Goa Bubau di Pasui Kecamatan Buntu Batu;
l. Desa Wisata Limbuang di Kecamatan Maiwa;
m. Goa Nippon di Lura Kecamatan Anggeraja;
n. Kuburan Tua Nenek Lintik di Baroko (perbatasan Enrekang-Toraja), makam Tandi Jalling Mandante;
o. Lo’ko Malillin di Pana Kecamatan Alla; dan
p. Kawasan pendidikan di Maiwa.
q. Kawasan Strategis Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi, terdiri atas:
r. Kawasan potensi tambang batu bara di Kecamatan Enrekang;

s. Kawasan PLTA di Desa Lebani Kecamatan Bungin dan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang; dan
t. Kawasan penambangan minyak Blok Enrekang di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang;
u. Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
v. Kawasan DAS Saddang, DAS Bila, DAS Mata Alio dan DAS Malua;
w. Kawasan, mata air Bongso di Pasui Kecamatan Buntu Batu, kawasan mata air Mata Allo di Kalosi Kecamatan Alla, dan kawasan mata air Malauwe di Kecamatan Enrekang;
x. Kawasan Wisata Pemandian Lewaja di Kecamatan Enrekang;
y. Kawasan wisata pemandian alam Kaluppang di Kecamatan Maiwa;
z. Kawasan wisata alam terpadu Gunung Bambapuang dan Gunung Nona di Kecamatan Anggeraja;
aa. Wilayah Rawan Bencana

Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kabupaten Enrekang adalah bencana tanah longsor, namun sesekali terjadi Banjir dan Angin Puting. Beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :Kawasan rawan bencana alam zona patahan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Masalle,

Kecamatan Baroko, Kecamatan Alla dan Kecamatan Malua Kawasan rawan longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Enrekang; dan

Kawasan rawan banjir di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor merupakan bagian dari identifikasi dan interpretasi faktor-faktor geologi yang bekerja pada suatu daerah. Pada dasarnya ada dua faktor penyebab terjadinya tanah longsor antara lain: faktor pengontrol (internal) dan faktor pemicu (eksternal). Faktor pengontrol meliputi jenis litologi, hidrologi, soil/tanah, struktur geologi dan bentukan morfologi, sedangkan faktor pemicunya terdiri dari kondisi tata guna lahan, curah hujan dan aktivitas manusia.

Kriteria kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsoran Bencana tanah longsor merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan vegetasi di kawasan resapan air daerah (hulu) sehingga semakin lama air dapat mengikis tanah dan akhirnya terjadi longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Enrekang meliputi daerah-daerah yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, DAS Mata Allo, dan sekitar ruas-ruas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, serta beberapa titik lainnya.

Banjir besar terjadi apabila air hujan cukup tinggi dan jatuh tersebar merata di seluruh daerah tangkapan air, kemudian berubah menjadi limpasan permukaan yang terkumpul secara cepat pada suatu titik keluaran (outlet). Faktor alami daerah tangkapan air merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan limpasan permukaan dari seluruh daerah tangkapapan air untuk bisa terkumpul secara bersama-sama di titik keluaran.

Proses terjadinya angin puting beliung, biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang hari suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul, akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh awan secara vertikal, selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor PDAM dan Kantor BAPENDA Kabupaten Enrekang periode tahun 2014-2020. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan *Miscrosoft Excel 2010* dan SPSS versi 21 untuk dapat mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti, dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel (X) terhadap variabel (Y) yaitu terdiri dari variabel bebas (*Independent Variable*); Pendapatan PDAM, sedangkan variabel terikat (*Dependent Variable*); Pendapatan Asli daerah pada BAPENDA Kabupaten Enrekang dari tahun 2014 sampai pada tahun 2020.

1. Pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang

Untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang, untuk tahun 2014 - 2020, memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, sebab untuk 7 tahun terakhir kondisi Kinerja PDAM Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan, sebab laba yang diperoleh dari tahun ketahun mengalami peningkatan pendapatan pada Kantor PDAM Kabupaten Enrekang hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

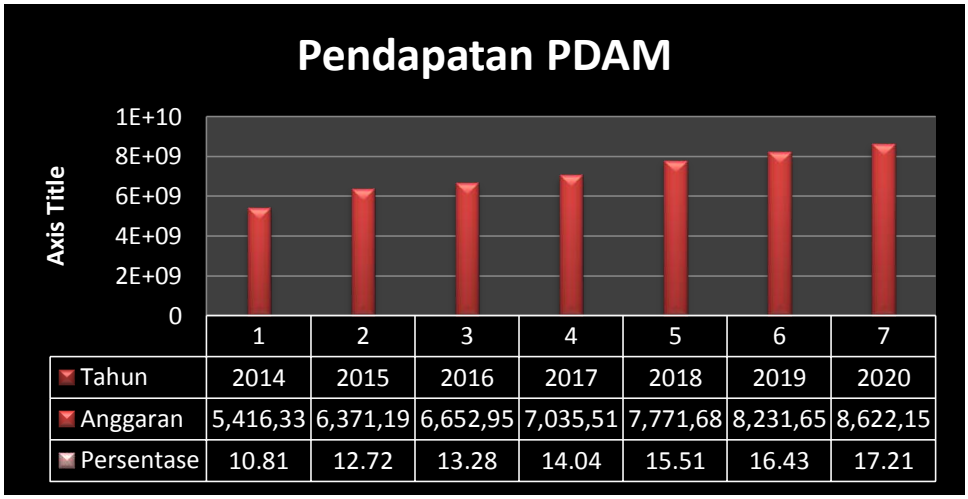
tabel 5 1 Pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang

Tahun	Pendapatan PDAM (Rp)	Persentase %
2014	5.416.333.405	10,81%
2015	6.371.192.906	12,72%
2016	6.652.950.558	13,28%
2017	7.035.512.708	14,04%
2018	7.771.680.391	15,51%
2019	8.231.656.646	16,43%
2020	8.622.157.262	17,21%

Sumber Data: PDAM 2021

Adapun grafik pertumbuhan pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5 1 Pendapatan Asli PDAM



Sumber Data: PDAM 2021

Pada tabel 5.1 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang diketahui, pada tahun 2014 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 5.416.333.405 Pada tahun 2015

pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 6.371.192.906 pada tahun 2016 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 6.652.950.558 Pada tahun 2017 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 7.035.512.708. pada tahun 2018 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 7.771.680.391 pada tahun 2019 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 8.231.656.646 dan adapun pert pada tahun 2015 pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 8.622.157.262

2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang pemerintah daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian laba Badan Usaha Milik daerah 4. Penerimaan yang ada Data Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada table 5.2 dibawah ini:

Tabel 5 2 Pendapatan Asli Kabupaten Enrekang

Tahun	PAD (Rp)	Persentase %
2014	33.945.145.644,63	7,41
2015	50.355.757.354,44	11,00
2016	56.383.446.988,95	12,32
2017	99.669.276.952,37	21,77
2018	66.043.333.304,23	14,43
2019	73.239.444.538,35	16,00
2020	78.197.414.651,00	17,08

Sumber Data: PAD 2021

Adapun grafik pertumbuhan pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada gambar 5.2 sebagai berikut:

tabel 5 3 Pendapatan Asli Kabupaen enrekang



Sumber Data: PAD 2021

Pada tabel dan gambar 5.2 pendapatan Alis Daerah Kabupaten Enrekang diketahui, pada tahun 2014 pendapatan PAD

Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 33.945.145.644,63 pada tahun 2015 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 33.945.145.644,63 pada tahun 2016 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 56.383.446.988,95 pada tahun 2017 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 99.669.276.952,37 pada tahun 2018 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 66.043.333.304,23 pada tahun 2019 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 73.239.444.538,35 dan pada tahun 2020 pendapatan PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 78.197.414.651,00

3. Analisis Penelitian

1) Kontribusi Pendapatan PDAM Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Adapun kontribusi pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2014 sampai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 4 Kontribusi Pendapatan PDAM Terhadap PAD

Tahun	Pendapatan PDAM (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2014	5.416.333.405	33.945.145.644,63	15,95
2015	6.371.192.906	50.355.757.354,44	12,65
2016	6.652.950.558	56.383.446.988,95	11,79
2017	7.035.512.708	99.669.276.952,37	7,05
2018	7.771.680.391	66.043.333.304,23	11,76
2019	8.231.656.646	73.239.444.538,35	11,23
2020	8.622.157.262	78.197.414.651,00	11,02

Sumber : Data Diolah 2021

Pada tabel 5.3 kontribusi pendapatan PDAM Kabupaten Enrekang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang diketahui, pada tahun 2014 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD sebesar 15,95 pada tahun 2015 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 12,65 pada tahun 2016 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD mengalamii penurunan sebesar 11,79 pada tahun 2017 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 7,05 pada tahun 2018 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 11,76 pada tahun 2019 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD kembali mengalami penurunan sebesar 11,23 dan pada tahun 2020 Kontribusi Pendapatan PDAM terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 11,02

2) Uji Regresi Linear Sederhana

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier Sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk menguji variabel independen (Pendapatan PDAM) terhadap variabel Dependen (PAD) dengan melihat kekuatan hubungan antar Pendapatan PDAM dengan, PAD. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

a) Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara bersama - sama terhadap variabel dependen:

Tabel 5 5 Hasil Ujian Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660[a]	.436	.323	3.80916

Sumber: Output SPSS 23

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*R Square)* sebesar 0,436. Hal ini berarti 43.6% variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan PDAM, Sedangkan sisanya (100% - 43.6% = 56.4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

b) Uji Coefficients[a]

Analisis regresi linier sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan satu variabel bebas *(independent variable),* digunakan sebagai alat untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung *(Dependent variable)".*Berikut hasil analisis yang menggunakan program SPSS:

Tabel 5 6 Hasil Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.169	9.997		-.517	.627
	X	1.362	.692	.660	1.967	.106

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui koefisien regresi untuk variabel independen menghasilkan nilai sebesar 1,362 yang bernilai positif . Jika dituliskan ke dalam persamaan regresi linier sederhana maka akan menjadi:

$Y = a + bX$

$Y = -5.169 + 1.362x$

Berdasarkan persamaan Tabel 5.5 diketahui Nilai konstanta sebesar 1.362 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pendapatan PDAM) adalah nol maka PAD terjadi sebesar 1.362.

Nilai signifikan berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan bahwa variabel Pendapatan PDAM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,106 sehingga dapat dinyatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi variabel pendapatan PDAM lebih besar dari nilai signifikansi α yaitu 0,05.

Hal ini menunjukan bahwa variabel independen pendapatan PDAM berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Enrekang. Maka hipotesis ditolak

B. Pembahasan

PDAM adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain.Keberadaan PDAM diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi prekonomian bagi masyarakat di daerah, dimana tujuan dibentuknya PDAM tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang pemerintah daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian laba Badan Usaha Milik daerah 4. Penerimaan yang ada Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Uraian tersebut dapat disimpulkan apabila pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan keuangan daerah, dimana pendapatan keuangan tersebut yang sah berfokus dari kemampuan-kemampuan yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah

Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu membuktikan bahwa perusahaan PDAM ini dibentuk untuk membantu meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Enrekang yang di gunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan publik.

PDAM memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi.Oleh karena itu, PDAM perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai perekonomian daerah. Laba dari PDAM diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap

Pendapatan Asli Daerah.Di Kabupaten Enrekang,

Dilihat dari hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan bahwa variabel Pendapatan PDAM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,106 sehingga dapat dinyatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi variabel pendapatan PDAM lebih besar dari nilai signifikansi α yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen pendapatan PDAM berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Enrekang. Maka hipotesis ditolak

Hal ini dilihat dari hasil kontribusi PDAM pada tahun 2014-2020 di Kabupaten Enrekang, dimana hasil Kontribusi PDAM terhadap PAD selama tujuh tahun belakangan bersifat menurun. Meskipun bersifat menurun, PDAM memberikan kontribusi dibawah 15%, sehingga dengan begitu kontribusi PDAM di Kabupaten Enrekang dikategorikan kurang selama tujuh tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kontribusi PDAM dalam penelitian ini memiliki pengaruh namun tidak signifikan dengan diperkuatnya data peneliti yang dilihat dari perhitungan kontribusi yang dinyatakan bahwa kontribusi pendapatan PDAM masuk dalam kategori kurang karena di bawah dari 15%.

Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizka Amalia (2011) dengan judul “Peranan PDAM Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta" dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa Laba PDAM berpengaruh signifikan terhadap PAD di DIY 2001-2010. Akan tetapi di Kabupaten Enrekang Kontribusi PDAM memberikan pengaruh yang bersifat negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2020.

Maka hal ini mengasumsikan bahwa ini disebabkan hasil kontribusi PDAM pada tahun 2014-2020 di Kabupaten Enrekang, dimana hasil kontribusi PDAM terhadap PAD selama tujuh tahun belakangan bersifat fluktuatif dan dibawah 15%. Laba PDAM tidak memberikan kontribusi yang cukup baik sehingga dengan begitu kontribusi PDAM diKabupaten Enrekang dikategorikan kurang selama tujuh tahun.

Hal ini menggambarkan bahwa laba PDAM sangatlah minim dalam menyumbang kepada PAD di Kabupaten Enrekang, hal ini terlihat dari tidak mencapai targetnya laba PDAM selama 7 tahun terakhir sehingga masih sangat kurang untuk memberikan kontribusi kepada PAD di Kabupaten Enrekang di dalam pengelolaannya masih belum optimal seperti yang disebabkan adanya faktor internal dan eksternal perusahaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni: Dilihat dari hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan bahwa variabel Pendapatan PDAM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,106 sehingga dapat dinyatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi variabel pendapatan PDAM lebih besar dari nilai signifikansi α yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen pendapatan PDAM berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Enrekang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga diharapkan untuk lebih mendukung sarana dan prasarana dalam memajukan PDAM Kabupaten Enrekang
2. Perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dalam hal memajukan PDAM

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik* : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Arief Himmawan DN,Djoko Wahjudi. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanan Otonomi Daerah*.Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),Hal.189-205.

Edie Sugiarto.2015. *Analisis Efektivitas PDAM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamongan (Effectiveness Analysis Pdam To Increase Local Revenues In Lamongan).* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan Jurnal Ekbis / Vol . Xiv / No . 2 / Edisi September 2015.

Greuning, Hennie Van. et al. 2013. *International financial reporting standards : sebuah panduan praktis*. Jakarta : Salemba Empat.

Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar 2012. Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta : Salemba

Hasanuddin . 2016*. Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Aceh Barat.* Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh - Aceh Barat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia*.

Ike Juni Antika. 2017*. Analisis Kontribusi Bumd Terhadap Peningkatan Pad Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015*. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakul' Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung.

Laili, Fauzia Rohmatul Susanawati. 2014. *Efesiensi Rotating Biological Contactor Disc Datar Dan Baling-Baling Dengan Variasi Kecepatam Putaran pada Pengolahan Limbah Cair Tahu. Dalam Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Volume 1 No 2. 71-77. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya: Jawa Timur

Lau, Peter dan Nelson, Lam. 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting)* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Maznawaty S. E .2015. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Maluku Utara*

Martani, Dwi. dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (ed. 2, buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Noor, Juliansyah, 2014, *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen, Jakarta*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sodikin dan Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Suharyadi dan Purwanto. 2011. *"Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2"*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962, Tentang Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonessia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-sahamyang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah